

ASPEK SOSIAL BUDAYA SEBAGAI PENUNJANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA: Analisis Wacana Keberpihakan Otsus Papua

ANTONIA KLARA

surel: clalovfrans@gmail.com
Universitas Cenderawasih - Jayapura

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengungkap tentang wacana pemerintah menetapkan kebijakan melalui pemanfaatan keuangan dengan mendayagunakan berbagai sumber penerimaan daerah untuk membiayai program kegiatan dalam rangka membangun pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Fakta saat ini bahwa dengan meningkatnya pendapatan per kapita, kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan menjadi lebih tinggi, sehingga permintaan akan jenjang pendidikan menjadi lebih tinggi dan waktu untuk sekolah pun menjadi lebih lama. Dalam perspektif wacana ekonomi, pada hakikatnya bahwa pembangunan ekonomi ke seluruh daerah di Indonesia telah mendorong pemerintah pusat untuk melakukan kontrol politik dan ekonomi terhadap pemerintah daerah.

Pada prinsipnya, tulisan ini dielaborasi dalam rangka pembangunan yang berorientasi pada pemerintah daerah dengan memiliki ketergantungan fiskal sangat besar terhadap transfer dari pusat ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu, dana otsus yang diterima pemerintah daerah provinsi/kabupaten menjadi bagian transfer yang sangat penting dan dinantikan dalam menunjang pembangunan berbagai bidang di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

Kata Kunci: *sosial budaya, kebijakan pendidikan, Otsus Papua dan Kepulauan Yapen*

Abstract

This article aims to reveal the discourse on government to establish policies through the use of financial leverage a variety of revenue source to fund program activities in order to build a quality education for the people in the District Yapen Island Province of Papua. The fact today that increasing per capita income, the ability of people to pay for education becomes higher, so demand will be higher level of education and time for school to be longer. In the perspective of economics discourse, in essence that economic development to all regions in Indonesian has prompted the central government to carry out political and economic control of the local government.

In principle, this paper elaborated in the framework of development- oriented local government has very large fiscal dependency on transfers from the center to the regions at both provincial and district/city. For the special autonomy funds received by the provincial government/ district became part of the transfer is very important and eagerly anticipated in supporting the development of various areas in the District Yapen Island Province of Papua.

Keyword: *Social, Cultural, Education Policy, Papua Special Autonomy and Yapen Island.*

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah diakui bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengeksplorasi berbagai sumber daya, serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan politik yang sangat penting bagi pembangunan sosial. Dengan demikian, peningkatan pendidikan suatu bangsa menjadi sangat penting artinya bagi pembangunan negara tersebut.

Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan menjadi lebih tinggi, sehingga permintaan akan jenjang pendidikan menjadi lebih tinggi dan waktu untuk sekolah pun menjadi lebih lama. Di lain pihak, pendapatan per kapita yang meningkat menyebabkan penerimaan pemerintah meningkat, sehingga kemampuan pemerintah untuk memenuhi permintaan tersebut melalui pengeluaran pembangunan menjadi meningkat pula. Beberapa upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut meliputi berbagai kegiatan

yang berhubungan dengan penataran guru/ pembina, pengadaan peralatan belajar serta penyempurnaan kurikulum, yang dapat dilihat dalam pengeluaran pembangunan untuk sektor pendidikan.

Proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, baik terhadap total pengeluaran pembangunan maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara tidak langsung menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin tingginya permintaan atas sarana dan prasarana pendidikan. Secara tidak langsung hal itu menunjukkan seberapa jauh masyarakat menyadari pentingnya peranan pendidikan. Sama halnya, semakin besar proporsi pengeluaran pemerintah yang bersumber dari dana Otsus) untuk membiayai program/kegiatan bidang pendidikan kabupaten Kepulauan Yapen terhadap total dana otsus, secara tidak langsung menunjukkan reaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen atas semakin tingginya permintaan atas sarana dan prasarana pendidikan.

Analisis terhadap keberpihakan Otsus Papua melalui aspek sosial budaya yang mana menjadi penunjang kebijakan pengeluaran pembangunan untuk bidang pendidikan, menjadi indikator tingginya permintaan akan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan: (a) tingkat buta aksara, (b) tingkat pendidikan, (c) ketersediaan sarana/prasarana, dan (d) tingkat partisipasi sekolah

KONSEP DAN KERANGKA TEORI

Sosial Budaya (Pendidikan, Sarana Pendidikan, Buta Aksara, dan Partisipasi Sekolah)

Peningkatan pendidikan penduduk dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan serta jumlah penduduk yang telah mengenyam pendidikan formal. Semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan formal, semakin baik kondisi pendidikan di negara/daerah tersebut (Hera, dkk, 2007: 123).

Sarana pendidikan tidak terlepas dari tersedianya sarana pendidikan yang memadai, yang meliputi sarana fisik dan tenaga pengajar. Apalagi jika pertambahan penduduk secara alami masih cukup tinggi, seperti di Indonesia, maka pada saatnya kedua fasilitas tersebut perlu diperhatikan agar tujuan pendidikan, program belajar mengajar khususnya dapat tercapai dengan baik.

Kemampuan membaca dan menulis adalah faktor penting yang merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga sering juga dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas hidup manusia. Yang dimaksud dengan buta aksara di sini meliputi buta aksara latin dan angka, buta aksara bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar. Semakin kecil tingkat buta aksara, semakin baik kondisi pendidikan, dan semakin baik pula kualitas hidup penduduk di negara/daerah tersebut (Hera, dkk, 2007: 123)

Dalam hal ketersediaan sarana fisik, semakin tinggi rasio antara jumlah murid terhadap jumlah ruangan kelas berarti setiap kelas dapat menampung lebih banyak murid, sehingga kurang efektif bagi tujuan belajar mengajar. Dengan demikian rasio yang lebih kecil adalah lebih baik. Sementara dalam hal ketersediaan tenaga pengajar, semakin tinggi rasio jumlah murid terhadap jumlah guru berarti setiap guru harus melayani lebih banyak murid, sehingga beban tugasnya menjadi lebih berat. Dengan demikian rasio yang lebih rendah adalah lebih baik (Hera, dkk, 2007: 123-124)

Tingkat partisipasi pendidikan menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Tingkat partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sarana dan fasilitas pendidikan, biaya pendidikan dan sebagainya. Semakin tinggi partisipasinya, berarti banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah, sehingga semakin baik (Hera, dkk, 2007: 124).

Kebijakan Pendidikan

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 dalam Jimung (2005:83) bahwa pendidikan merupakan salah satu dari 11 kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/kotamadya) yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya Jimung (2005:42) bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan, pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara non diskriminatif dengan kualitas yang sama. Memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Pemerintah mengambil kebijakan melalui pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan berbagai sumber penerimaan daerah untuk membiayai berbagai program kegiatan dalam rangka membangun pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.

Otsus Papua

Jimung (2005:273) mengatakan bahwa pada masa orde baru pemerintah pusat cenderung menjadikan pemerintah daerah sebagai alat dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mensukseskan program-program pembangunan nasional yang belokasi di daerah. Dalam satu sisi, pemerintah daerah telah menjadi instrumen efektif bagi pemerintah pusat dalam menjalankan misi pembangunan daerah. Namun, pada sisi yang lain, pemerintah daerah telah menjadi instrumen yang sangat tergantung pada pusat dalam segala aspek. Pemerintah daerah menjadi sangat tergantung terutama dari subsidi pusat dalam menjalankan pembangunan daerah. Pusat menjadi raja dan daerah selalu mengemis kepadanya.

Menurut Kuncoro (2004:15) bahwa obsesi pembangunan ekonomi keseluruhan daerah Indonesia telah mendorong pemerintah pusat untuk melakukan kontrol politik dan ekonomi terhadap pemerintah daerah. Justifikasi yang biasanya diajukan adalah stabilitas politik merupakan prasyarat mutlak bagi lancarnya pembangunan. Tak pelak lagi, sentralisasi hubungan pusat-daerah lebih mencuat ke permukaan meskipun desentralisasi secara *de jure* sudah didendangkan sejak awal tahun 1970-an. Akibatnya, “pembangunan di daerah” memang terjadi, namun dengan inisiatif, perencanaan, dan dana dari pusat.

TEORI

Kebijakan

Keputusan dan pembuatan suatu kebijakan publik harus mengakomodasi tuntutan masyarakat, yang tuntutan tersebut didelegasikan kepada seseorang atau kelompok dalam model demokrasi perwakilan. Tuntutan tersebut seperti: perawatan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, makanan dan minuman bergizi, kebebasan untuk memaksimalkan preferensi tanpa gangguan orang lain, dan sebagainya (Fermana, 2009:38).

Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan itu dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu: (a) *Nilai-nilai Politik*. Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut pentingnya alternatif-alternatif itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinya; (b) *Nilai-nilai Organisasi*. Para pembuat keputusan, khususnya birokrat (sipil atau militer), mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi di mana ia terlibat di dalamnya. Organisasi, semisal badan-badan administrasi, menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan sanksi dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima, dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh organisasi. Sepanjang nilai-nilai semacam itu ada, orang-orang yang bertindak selaku pengambil keputusan dalam

organisasi itu kemungkinan akan dipedomani oleh pertimbangan-pertimbangan semacam itu sebagai perwujudan dari hasrat untuk melihat organisasinya tetap lestari, untuk tetap maju atau untuk memperlancar program-program dan kegiatan-kegiatannya atau untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang selama ini dinikmati; (c) *Nilai-nilai Pribadi*. Hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan finansial, reputasi diri, atau posisi historis kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Para politisi yang menerima uang sogok, misalnya sebagai hadiah perizinan atau penandatanganan kontrak pembangunan proyek tertentu, jelas mempunyai kepentingan pribadi dalam benaknya. Seorang presiden yang mengatakan di depan para wartawan bahwa ia akan menggebuk siapa saja yang bertindak inkonstitusional, jelas juga dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadinya, misalnya agar ia mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa sebagai seseorang yang konsisten dan nasionalis; (d) *Nilai-nilai Kebijaksanaan*. Dari perbincangan di atas, satu hal hendaklah dicamkan, yakni janganlah kita mempunyai anggapan yang sinis dan kemudian menarik kesimpulan bahwa para pengambil keputusan politik itu semata-mata hanyalah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan demi keuntungan politik, organisasi atau pribadi. Sebab, para pembuat keputusan mungkin pula bertindak berdasarkan atas persepsi mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu mengenai kebijaksanaan negara apa yang sekiranya secara moral tepat dan benar; dan (5) *Nilai-nilai Ideologis*. Ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakiniinya.

Ekonomi

Sistem penganggaran sektor publik dalam sejarahnya berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan masyarakat. Sektor publik merupakan refleksi dari arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan dari pemerintah daerah (Ritonga, 2012:21).

Todaro dan Smith (2002:438) mengatakan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan jauh lebih baik di negara-negara berpendapatan tinggi. Terdapat berbagai alasan mengapa terjadi hubungan sebab-akibat dalam dua arah seperti itu: Dengan pendapatan yang tinggi, masyarakat dan pemerintah mampu mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk pendidikan dan kesehatan; dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah dicapai.

Dalam rangka pembangunan, pemerintah daerah memiliki ketergantungan fiskal yang sangat besar terhadap transfer dari pusat ke daerah baik provinsi maupun kabupaten. Sehingga, dana otsus yang diterima pemerintah daerah provinsi/kabupaten dalam rangka otsus, menjadi bagian transfer yang sangat penting dan dinantikan dalam menunjang pembangunan berbagai bidang.

Menurut Todaro dan Smith (2002:453-454) bahwa tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang, walaupun banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat nonpasar (atau nonekonomis), secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan barang ataupun jasa ekonomi lainnya. Pada sisi *penawaran*, jumlah sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan universitas lebih banyak ditentukan oleh proses politik, yang sering tidak ada kaitannya dengan kriteria ekonomi. Karena semakin besar dan kuatnya tekanan-tekanan politik yang diletakkan ke pundak pemerintahan negara-negara dunia ketiga untuk menyediakan tempat sekolah yang lebih banyak, maka kita dapat mengasumsikan dengan aman bahwa tingkat penawaran atau penyediaan tempat-tempat sekolah ini (oleh negara) dibatasi oleh tingkat pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pada gilirannya, hal tersebut akan

dipengaruhi oleh tingkat permintaan agregat dari masyarakat terhadap pendidikan. *Permintaan* atas tingkat pendidikan yang dianggap harus dicapai untuk mendapatkan pekerjaan berpenghasilan tinggi di sektor modern bagi seseorang.

Pendidikan

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat dan bangsa”.

Rohman (2009:10) menyimpulkan beberapa hal terkait teori pendidikan: (1) pendidikan berwujud aktivitas inetraktif yang sadar dan terencana, (2) dilakukan oleh minimal dua orang, satu pihak berperan sebagai fasilitator dan dinamisator sedang pihak lainnya sebagi subyek yang berupaya mengembangkan diri, (3) proses dicapai melalui penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran, (4) terdapat nilai yang diyakini kebenarannya sebagai dasar aktivitas, (5) memiliki tujuan baik dalam rangka mengembangkan segenap potensi internal individu anak, (6) puncak ketercapaian tujuan adalah kedewasaan, baik secara fisik, psikologik, sosial, emosional, ekonomi, moral dan spiritual pada peserta didik.

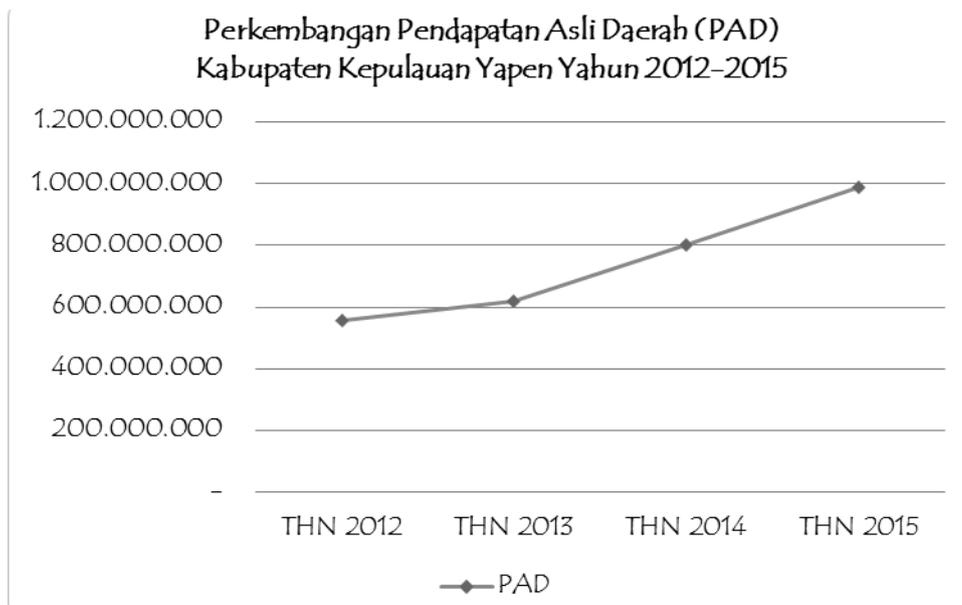
METODOLOGI

Metodologi yang melandasi kajian ini merujuk pada kerangka berpikir penelitian kualitatif, yakni pemikiran Max Weber (1997) yang menyatakan bahwa pokok penelitian sosial (wacana ekonomi) bukan semata-mata gejala-gejala sosial saja, tetapi merujuk pada pada makna-makna yang terdapat di balik tindakan-tindakan perorangan atau kelompok dalam menjalankan kebijakan atau yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tersebut. Cara berpikir tersebut dilandasi pada pandangan dari Max Weber, yakni *verstehen* atau pemahaman (jadi bukan *erklaren* atau penjelasan). Untuk dapat memahami makna yang ada dalam suatu gejala sosial (kebijakan dan keberpihakan), maka kajian ini dapat mencapai tingkat pemahaman yang sempurna mengenai makna-makna yang terwujud dalam gejala-gejala sosial yang diamatinya (bdk. Suparlan, 1997:95).

PEMBAHASAN

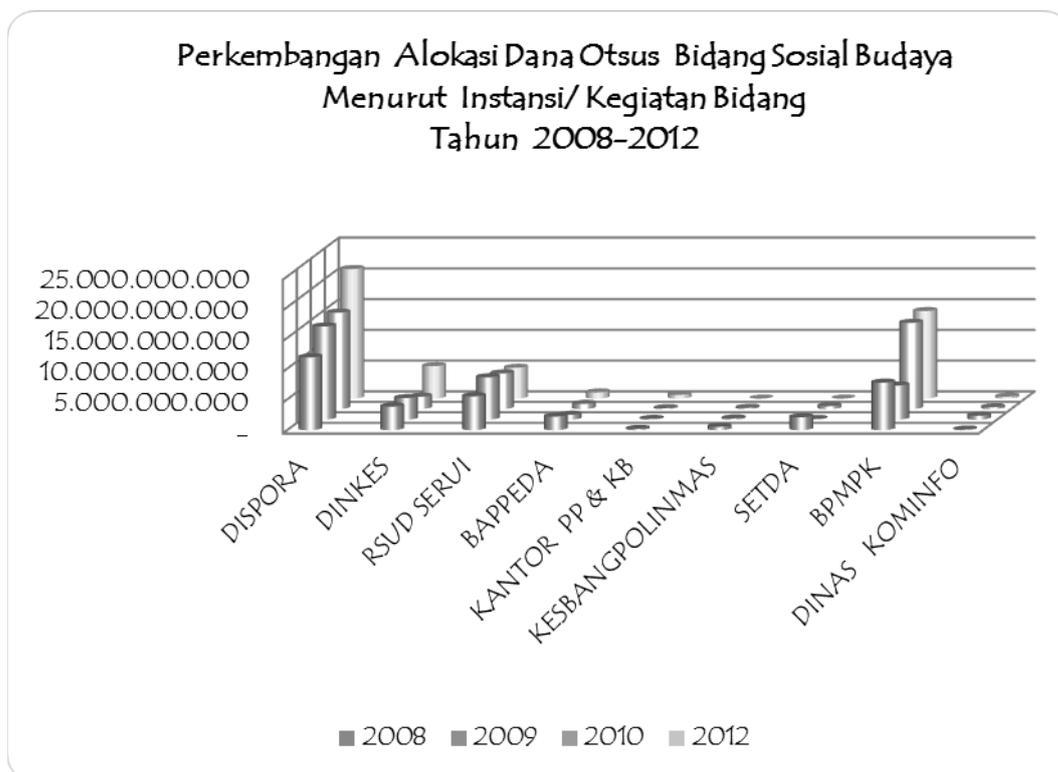
Fakta dan Realita

Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (*grants*) yang di drop dari pusat (Kuncoro 2004:8).



Grafik 1. Perkembangan PAD Kabupaten Kepulauan Yapen

PAD Kabupaten Kepulauan Yapen walaupun terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir (2012-2015) namun kenyataan belum mampu membiayai kebutuhan daerah sehingga lebih mengandalkan transfer dari pusat.



Grafik 2. Perkembangan Alokasi Dana Otsus Bidang Sosbud Kepulauan Yapen

Kabupaten Kepulauan Yapen membiayai permintaan masyarakat di bidang pendidikan, melalui berbagai kegiatan/program yang direncanakan dengan memanfaatkan alokasi dana otsus yang menjadi penerimaannya. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang menerima alokasi tertinggi dari beberapa bidang lainnya (lihat grafik di atas).

Menurut Kuncoro (2009:40) bahwa isu sentral dalam pelaksanaan otonomi daerah maupun khusus diantaranya: (1) bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah, (2) dengan otda, ada tendensi masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama mengumpulkan PAD, (3) terkait dengan masalah *timing* dan *political will*, (4) dalam tahap awal otda, masih terasa adanya *grey-area* kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota. Ini terjadi karen belum tuntasnya penyerahan sarana/prasarana maupun pengalihan dari pegawai pusat ke daerah. Muncul ketidakpuasan pembagian sumber keuangan, terutama terhadap dana bagi hasil SDA. Ini tercermin dari belum puasnya Aceh, Riau, Kaltim, dan Papua terhadap pola bagi hasil yang sudah diatur dalam UU. Isu disintegrasi muncul akibat daerah merasa belum dipenuhinya aspirasi daerah, (5) tujuan otonomi daerah ada meningkatkan pelayanan publik. Dengan mendekati pemda kepada rakyatnya diharapkan pelayanan publik lebih efektif dan efisien, dan (6) lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, berupaya menjalankan fungsinya melakukan pelayanan publik, sebagai pihak yang lebih dekat dengan masyarakatnya serta lebih memahami permasalahan yang dihadapi, maka lahir kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang dihadapi akan permintaan bidang pendidikan adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana otsus untuk membiayainya. Menurut Wahab (2008:38) bahwa sedikitnya ada dua alasan yang dapat dikemukakan mengenai kebijakan yang lahir karena isu: Pertama, proses pembuatan kebijakan publik di sistem politik mana pun lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu masalah atau isu tertentu. Kedua, tingkat relatif demokratis atau tidaknya suatu sistem politik, diantaranya dapat diukur dari cara bagaimana mekanisme mengalirnya isu menjadi agenda kebijakan pemerintah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan publik.

Fakta dari aspek sosial budaya yang dapat diamati di Kabupaten Kepulauan Yapen di era Otsus Papua, sebagai berikut.

a) Buta Aksara

Berdasarkan data tabel 1, terlihat bahwa penduduk umur 15 tahun keatas di kabupaten Kepulauan Yapen di perkotaan yang telah melek huruf mencapai 97,35 persen dan di perdesaan mencapai 86,82 persen dan secara keseluruhan penduduk yang telah melek huruf mencapai 91,65 persen. Artinya, kurang lebih hanya 8,3 persen dari penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen yang mengalami buta aksara.

Tabel 1. Angka Melek Huruf Kabupaten Yapen Tahun 2015

Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Yapen, 2015			
Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	97,59	88,28	92,63
Perempuan	97,07	85,26	90,60
Laki-Laki + Perempuan	97,35	86,82	91,65

Sumber : Susenas, 2015 (www.kepulauanyapenkab.bps.go.id)

b) Tingkat Pendidikan

Tabel 2 di bawah ini menunjukkan bahwa penduduk yang tamat perguruan tinggi mencapai 8,65 persen, penduduk yang berhasil tamat SMA/ sederajat mencapai 27,72 persen, penduduk yang tamat SMP/ sederajat mencapai 22,38 persen, penduduk yang tamat SD/ sederajat mencapai 19,41 persen, dan penduduk yang belum pernah sekolah hanya 11,67 persen. Artinya, kurang lebih 88 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeyam pendidikan formal di berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 2. Persentasi Pendudukan Menurut Pendidikan di Kabupaten Yapen Tahun 2015

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Kepulauan Yapen, 2015			
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tidak/Belum Pernah Sekolah	3,61	18,51	11,67
Tidak Tamat SD	6,04	13,68	10,17
Tamat SD/Sederajat	11,24	26,36	19,41
Tamat SMP/Sederajat	25,70	19,55	22,38
Tamat SMA/Sederajat	39,30	17,88	27,72
Perguruan Tinggi	14,11	4,02	8,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas, 2015 (www.kepulauanyapenkab.bps.go.id)

c) Sarana Pendidikan

Sarana dalam hal ketersediaan tenaga pengajar (guru) dari tabel 3 di bawah ini tampak bahwa ratio di jenjang SD 31,36 persen, jenjang SMP 25,84 persen dan jenjang SMU 38 persen. Artinya, secara keseluruhan beban guru tidak berat karena rasionya masih dalam standar efektif untuk menangani satu rombongan belajar, sehingga semakin efektif dalam melaksanakan proses belajar mengajar

Tabel 3. Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Yapen, Tahun 2012

Jenjang Pendidikan	Ratio Murid Guru (%)
SD	31,36
MI	38,25
SMP	25,84
MTs	8
SMU	38
SMK	27

Sumber : DDA Kabupaten Kep. Yapen, 2012

d) Partisipasi Sekolah

Berdasarkan tabel 4 di bawah ini, menunjukkan bahwa partisipasi sekolah di usia sekolah 7-12 tahun mencapai 94,23 persen, usia 13-15 tahun mencapai 97,84 persen dan usia 16-18 tahun mencapai 83,48 persen. Artinya semakin banyak anak usia sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah berpartisipasi atau terlibat sekolah, selain itu juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat makin tinggi akan pentingnya pendidikan.

Tabel 4. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Yapen Tahun 2015

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Yapen, 2015				
Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Sekolah			
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	96,05	95,95	88,78	45,36
Perempuan	92,71	100,00	77,32	30,94
Laki-Laki + Perempuan	94,23	97,84	83,48	38,95

Sumber : Susenas, 2015(www.kepulauanyapenkab.bps.go.id)

PENUTUP

Berdasarkan uraian–uraian tentang Aspek Sosial Budaya Sebagai Penunjang Kebijakan Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua: Analisis Keberpihakan Otsus Papua, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) keberpihakan Otsus Papua makin meningkatkan ketergantungan fiskal terhadap transfer dari pusat ke daerah; (2) PAD Kabupaten Kepulauan Yapen terus meningkat mendekati kisaran 1 (satu) milyar dalam 5 (lima) tahun terakhir, namun belum mencukupi untuk membiayai sejumlah permintaan masyarakat di bidang pendidikan yang hampir mencapai 22 (dua puluh dua) milyar dalam 5 (lima) tahun terakhir; (3) kebijakan fiskal untuk membiayai pendidikan serta segala bentuk keberpihakan tidak mampu dibiayai dengan PAD Kabupaten Kepulauan Yapen; dan (4) Fakta hari ini bahwa aspek sosial budaya mengalami peningkatan luar biasa dalam 5 (lima) tahun terakhir, artinya tidak dipungkiri semua keberhasilan dan peningkatan terjadi karena andil dari pusat melalui transfer dana otsus.

DAFTAR PUSTAKA

- DDA Kabupaten Kepulauan Yapen 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Yapen.
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Jimung, Marthin. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ritonga, Irwan. 2012. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

- Suparlan. P. 1997. *Paradigma Naturalistik dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya*. Majalah Antropologi Indonesia. No. 53. Vol. 21. Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia.
- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan dan Widyanti. 2007. *Indikator-Indikator Makro Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Todaro, Michael dan Stephen Smith. 2006. *Pembangaunan Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- www.kepulauanyapenkab.bps.go.id